

KOP

PEMERINTAH KALURAHAN

Nomor	:	\${nomor_naskah}	Sleman, \${tanggal_naskah}
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:	1 (Satu) Bendel	Yth. Panewu
Hal	:	Penyampaian LPPKal TA 2025	di Sleman

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor: 400.100.2.2/150 tanggal 30 Januari 2026 dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta merujuk pada ketentuan teknis berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) (Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa), Pemerintah Kalurahan ... *(diisi nama Kalurahan)* telah melakukan penyusunan LPPKal *(diisi nama Kalurahan)* Tahun Anggaran 2025 dengan tepat waktu sesuai penjadwalan siklus tahunan kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyampaikan laporan dimaksud kepada Panewu untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMK.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lurah

\${ttd_pengirim}

Nama

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
 2. Inspektur Kabupaten Sleman.

**SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LPPKAL) AKHIR TAHUN ANGGARAN**

1. Halaman Sampul

Judul: LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN *(diisi nama kalurahan)* TAHUN *(diisi tahun anggaran yang telah selesai dilaksanakan)*
(LPPKAL *(diisi nama kalurahan)* TAHUN)

Warna sampul: Hijau

2. Daftar Isi

No.	Sistematika	halaman
1.	Halaman Sampul.....	
2.	Daftar Isi	
3.	Kata Pengantar	
4.	BAB I Pendahuluan	
	A. Tujuan Penyusunan Laporan	
	1. Tujuan Umum	
	2. Tujuan Khusus	
	B. Visi dan Misi	
	1. Visi	
	2. Misi	
	C. Strategi dan Kebijakan	
6.	BAB II Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
	A. Pendapatan	
	B. Belanja	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak	
	C. Realisasi APBKAL	
7.	BAB IV Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi	
	A. Keberhasilan	
	B. Permasalahan	
	C. Solusi	
8.	BAB V Penutup	
	Lampiran Rekapitulasi Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	

3. Kata Pengantar

Pengantar dari Lurah, mencantumkan tempat, tanggal, tandatangan Lurah, dan cap basah Pemerintah Kalurahan.

4. BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

1. Tujuan Umum

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penyusunan LPPK didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, antara lain meliputi:

a. sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati

LPPK merupakan dokumen resmi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program kerja, pengelolaan anggaran, serta tugas pembantuan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.

b. sebagai transparansi dan akuntabilitas

LPPK memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian pemerintah kalurahan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam pembangunan kalurahan.

c. sebagai bahan monitoring dan evaluasi

LPPK memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja Lurah dan menetapkan kebijakan pembinaan maupun pengawasan lebih lanjut.

B. Visi dan Misi

Gambaran tentang kondisi Kalurahan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan kalurahan yang dijabarkan dalam sejumlah hasil pembangunan yang hendak dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan kalurahan dengan melihat potensi dominan yang dimiliki.

1. Visi

Uraian visi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

2. Misi

Uraian misi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Kalurahan

Berisi matriks uraian prioritas Misi, strategi kebijakan, dan realisasi kegiatan yang dilakukan.

Contoh:

1. Matriks strategi kebijakan sesuai misi

No.	PRIORITAS MISI KALURAHAN	STRATEGI KEBIJAKAN	KEGIATAN
	(diisi point-point misi Kalurahan)	(dihubungkan dengan strategi kebijakan yang dilakukan)	(aktualisasi kegiatan di tahun berkenaan)
1.	Meningkatkan Profesional seluruh Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan (CONTOH)	- Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek, dll di tiap sub bidang sesuai tugas dan fungsi Pamong Kalurahan dan LKK - Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan - Pembentukan LKK (PKK, LPMK, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	- Bimtek Pembuatan RAK dan SPP Siskeudes Tahun 2025 - Bimtek Peningkatan Pelayanan di Pemerintah Kalurahan - Perbaikan pagar Kalurahan - Penambahan kursi tunggu di ruang pelayanan - Pembaharuan SK Kepengurusan
	(dst diisi misi Kalurahan)	-	-

2. Matriks program pemerintah pusat, pemerintah daerah, program yang masuk Kalurahan

No.	RPJMN, RPJMDaerah Provinsi/Kabupaten	Program	Kegiatan		
			Tematik	Program	Progres
1.	Pengentasan Kemiskinan	- Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) - Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Lansia - Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni - Stimulan pembangunan MCK keluarga	Penyaluran BLT-DD Pencegahan dan penanggulangan stunting Rumah layak huni Jamban sehat	Penyaluran BLT-DD Pemberian PMT bagi Balita dan Lansia Bedah rumah tidak layak huni Pembangunan sanitasi	Tahun 2025 telah disalurkan kepada 13 KPM Tahun 2025 persentase stunting 4% (menurun) Tahun 2025 telah dilakukan bedah rumah untuk 3 rumah Tahun 2025 7 rumah telah mendapat bantuan

		miskin/tidak mampu			
2.	Peningkatan Budaya Literasi (Perpustakaan)	- Pembangunan/r ehabilitasi/ Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Ta man Bacaan Kalurahan/ Sang gar Belajar Milik Kalurahan - Pembuatan Tempat Bacaan/Perpust akaan Dusun	Perpustakaan Kalurahan Perpustakaan Padukuhan	Rehabilitasi Perpustakaan: pembelian kursi meja kursi Pembuatan Perpustakaan Padukuhan	Tersedia perpustakaan Kalurahan yang nyaman 7 padukuhan telah memiliki perpustakaan
3.	Indeks Perilaku Anti Korupsi	- Pos pengaduan dengan digital	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan melalui media sosial/aplikasi	16 Pengaduan telah ditindaklanjuti
4.	Tanggguh Bencana	- Penanggulangan bencana alam dan non alam	Peta Resiko Bencana	Pembuatan Peta Bencana	Ketersediaan Peta Bencana dan rambu-rambunya
5.	Koperasi Desa Merah Putih	- Pembentukan/Fa silitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Sarana Prasarana KDMP	Pembangunan gedung KDMP	Tersedia Gedung KDMP
6.	Ketahanan Pangan	- Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Budidaya Terong Jepang	Penyiapan Lahan (perataan/pen ggemburan dsb)	Persiapan
7.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum	- Bantuan Hukum untuk aparaturn kalurahan dan masyarakat miskin	Posbankum Kalurahan	Pembentukan Posbankum Kalurahan	Tersedianya Posbankum di Kantor Kalurahan
8.	Kegiatan lain dalam rangka program pusat/daerah misalnya: pengelolaan sampah, keistimewaan (budaya), Pajak Bumi Bangunan				

5. BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bab ini diisi dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal ditambah dengan tabel persentase realisasi di kolom paling kanan.

A. PENDAPATAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan Asli Kalurahan			
2.	Dana Desa			
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
4.	Alokasi Dana Desa			
5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten			
6.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
7.	Lain-lain Pendapatan yang sah			

B. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan			
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	60.0000.000	100
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.004.631.200	1.004.631.200	100
113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran)	174.393.757	148.135.718	100
	dst			
	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan			
	dst			

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, telah disusun Peraturan Kalurahan sebagai berikut:

1. Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

2. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan
3. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Renana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026
4. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2021 sampai dengan 2027
5. dst

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Pendidikan			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal			
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga			
	dst			
	Sub Bidang Kesehatan			
	dst			

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			
	Dst			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	Dst			

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
1	Pelatihan Budidaya Perikanan			
	dst			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			

1	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan			
	dst			
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
	dst			

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana			
	dst			
	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	dst			

C. REALISASI APBKAL

Berisi ringkasan realisasi APBKal uraian, anggaran, realisasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKAL)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Pendapatan			
	Pendapat Asli Kalurahan			
	dst			
2	Belanja			
	Belanja Pegawai			
	dst			
3	Pembiayaan			
	dst			

6. BAB III KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

A. KEBERHASILAN

Prestasi Kalurahan/Individu dan/atau Kelompok yang mewakili Kalurahan

No.	Prestasi	Tingkat	Keterangan
1.	Juara Lomba Kalurahan	DIY	
2.	Desa Percontohan Anti Korupsi	DIY	
dll			

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi

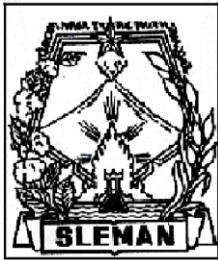
7. BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelaksanaan APBKal, ucapan terima kasih, dan saran masukan yang mendukung sinkronisasi arah kebijakan pemerintah pusat, daerah provinsi/kabupaten.

8. LAMPIRAN

Lampiran sebagaimana Format Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa

1. RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
2. REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN
3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN
4. DATA APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
5. KINERJA APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
6. DATA PENGELOLAAN KEKAYAAN/ASET KALURAHAN TAHUN
7. CAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN
8. CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI DAN DATA KALURAHAN TAHUN
9. KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN TAHUN



KOP PEMERINTAH KALURAHAN

Sleman, \${tanggal_naskah}

Nomor : \${nomor_naskah} Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua BPKal
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Penyampaian LKPPKal TA di Sleman
2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor: 400.100.2.2/150 tanggal 30 Januari 2026 dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta merujuk pada ketentuan teknis berkaitan dengan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) (Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa). Pemerintah Kalurahan ... *(diisi nama Kalurahan)* telah melakukan penyusunan LKPPKal *(diisi nama Kalurahan)* Tahun Anggaran 2025 dengan tepat waktu sesuai penjadwalan siklus tahunan kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyampaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi BPKal.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lurah

\${ttd_pengirim}

Nama

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
 - 2. Inspektur Kabupaten Sleman.

**SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN (LKPPKAL) AKHIR TAHUN ANGGARAN**

1. Halaman Sampul

Judul: LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN (diisi nama kalurahan) TAHUN (diisi tahun anggaran yang telah
selesai dilaksanakan) (LKPPKAL (diisi nama kalurahan) TAHUN)

Warna sampul: Hijau

2. Daftar Isi

No.	Sistematika	halaman
1.	Halaman Sampul.....	
2.	Daftar Isi	
3.	Kata Pengantar	
4.	BAB I Pendahuluan	
	A. Tujuan Penyusunan Laporan	
	1. Tujuan Umum	
	2. Tujuan Khusus	
	B. Visi dan Misi	
	1. Visi	
	2. Misi	
	C. Strategi dan Kebijakan	
5.	BAB II Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
	A. Pendapatan	
	B. Belanja	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak	
	C. Realisasi APBKAL	
6.	BAB IV Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi	
	A. Keberhasilan	
	B. Permasalahan	
	C. Solusi	
7.	BAB V Penutup	
	Lampiran Rekapitulasi Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	

3. Kata Pengantar

Pengantar dari Lurah, mencantumkan tempat, tanggal, tandatangan Lurah, dan cap basah Pemerintah Kalurahan.

4. BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

1. Tujuan Umum

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penyusunan LKPPK didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, antara lain meliputi:

a. sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal)

LPPKal merupakan dokumen resmi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program kerja, pengelolaan anggaran, serta tugas pembantuan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.

b. sebagai transparansi dan akuntabilitas

LPPKal memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian pemerintah kalurahan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam pembangunan kalurahan.

c. sebagai bahan monitoring dan evaluasi

LPPKal memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja Lurah dan menetapkan kebijakan pembinaan maupun pengawasan lebih lanjut.

B. Visi dan Misi

Gambaran tentang kondisi Kalurahan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan kalurahan yang dijabarkan dalam sejumlah hasil pembangunan yang hendak dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan kalurahan dengan melihat potensi dominan yang dimiliki.

1. Visi

Uraian visi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

2. Misi

Uraian misi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Kalurahan

Berisi matriks uraian prioritas Misi, strategi kebijakan, dan realisasi kegiatan yang dilakukan.

Contoh:

1. Matriks strategi kebijakan sesuai misi

No.	PRIORITAS MISI KALURAHAN	STRATEGI KEBIJAKAN	KEGIATAN
	<i>(diisi point-point misi Kalurahan)</i>	<i>(dihubungkan dengan strategi kebijakan yang dilakukan)</i>	<i>(aktualisasi kegiatan di tahun berkenaan)</i>
1.	Meningkatkan Profesional seluruh Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan (CONTOH)	- Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek, dll di tiap sub bidang sesuai tugas dan fungsi Pamong Kalurahan dan LKK - Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan - Pembentukan LKK (PKK, LPMK, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu	- Bimtek Pembuatan RAK dan SPP Siskeudes Tahun 2025 - Bimtek Peningkatan Pelayanan di Pemerintah Kalurahan - Perbaikan pagar Kalurahan - Penambahan kursi tunggu di ruang pelayanan - Pembaharuan SK Kepengurusan

2. Matriks program pemerintah pusat, pemerintah daerah, program yang masuk Kalurahan

No.	RPJMN, RPJMDaerah Provinsi/Kabupaten	Program	Kegiatan		
			Tematik	Program	Progress
1.	Pengentasan Kemiskinan	- Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) - Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Lansia - Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni - Stimulan pembangunan MCK keluarga miskin/tidak mampu	Penyaluran BLT-DD Pencegahan dan penanggulangan stunting Rumah layak huni Jamban sehat	Penyaluran BLT-DD Pemberian PMT bagi Balita dan Lansia Bedah rumah tidak layak huni Pembangunan sanitasi	Tahun 2025 telah disalurkan kepada 13 KPM Tahun 2025 persentase stunting 4% (menurun) Tahun 2025 telah dilakukan bedah rumah untuk 3 rumah Tahun 2025 7 rumah telah mendapat bantuan

2.	Peningkatan Budaya Literasi (Perpustakaan)	- Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan - Pembuatan Tempat Bacaan/Perpustakaan Dusun	Perpustakaan Kalurahan Perpustakaan Padukuhan	Rehabilitasi Perpustakaan: pembelian kursi meja kursi Pembuatan Perpustakaan Padukuhan	Tersedia perpustakaan Kalurahan yang nyaman 7 padukuhan telah memiliki perpustakaan
3.	Indeks Perilaku Anti Korupsi	- Pos pengaduan dengan digital	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan melalui media sosial/aplikasi	16 Pengaduan telah ditindaklanjuti
4.	Tangguh Bencana	- Penanggulangan bencana alam dan non alam	Peta Resiko Bencana	Pembuatan Peta Bencana	Ketersediaan Peta Bencana dan rambu-rambunya
5.	Koperasi Desa Merah Putih	- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Sarana Prasarana KDMP	Pembangunan gedung KDMP	Tersedia Gedung KDMP
6.	Ketahanan Pangan	- Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Budidaya Terong Jepang	Penyiapan Lahan (perataan/penggemburan dsb)	Persiapan
7.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum	- Bantuan Hukum untuk aparaturnya kalurahan dan masyarakat miskin	Posbankum Kalurahan	Pembentukan Posbankum Kalurahan	Tersedianya Posbankum di Kantor Kalurahan
8.	Kegiatan lain dalam rangka program pusat/daerah misalnya: pengelolaan sampah, keistimewaan (budaya), Pajak Bumi Bangunan				

5. BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bab ini diisi dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal ditambah dengan tabel persentase realisasi (%) di kolom paling kanan.

A. PENDAPATAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan Asli Kalurahan			
2.	Dana Desa			
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
4.	Alokasi Dana Desa			
5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten			
6.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
7.	Lain-lain Pendapatan yang sah			

B. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan			
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	60.0000.000	100
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.004.631.200	1.004.631.200	100
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran)	174.393.757	148.135.718	100
	dst			
	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan			
	dst			

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, telah disusun Peraturan Kalurahan sebagai berikut:

1. Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

2. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan
3. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Renana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026
4. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2021 sampai dengan 2027
5. Dst

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Pendidikan			
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal			
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga			
	dst			
	Sub Bidang Kesehatan			
	dst			

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			
	dst			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	dst			

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
1.	Pelatihan Budidaya Perikanan			
	dst			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			

1.	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan			
	dst			
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
	dst			

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana			
	dst			
	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	dst			

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, telah disusun Peraturan Kalurahan sebagai berikut:

1. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahunan Anggaran 2026
2. Dst

C. REALISASI APBKAL

Berisi ringkasan realisasi APBKal uraian, anggaran, realisasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

6. BAB III KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

A. KEBERHASILAN

Prestasi Kalurahan/Individu dan/atau Kelompok yang mewakili Kalurahan

No.	Prestasi	Tingkat	Keterangan
1.	Juara Lomba Kalurahan	DIY	
2.	Desa Percontohan Anti Korupsi	DIY	
dll			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun capaian realisasi fisik (%) yang tidak dapat terlaksana secara optimal dan upaya yang akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
	(diisi dengan kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100%)		

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi

7. BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelaksanaan APBKal, ucapan terima kasih, dan saran masukan yang mendukung sinkronisasi arah kebijakan pemerintah pusat, daerah provinsi/kabupaten.

8. LAMPIRAN

Lampiran sebagaimana Format Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa

1. RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
2. REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN
3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN
4. DATA APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
5. KINERJA APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
6. DATA PENGELOLAAN KEKAYAAN/ASET KALURAHAN TAHUN
7. CAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN
8. CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI DAN DATA KALURAHAN TAHUN
9. KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN TAHUN